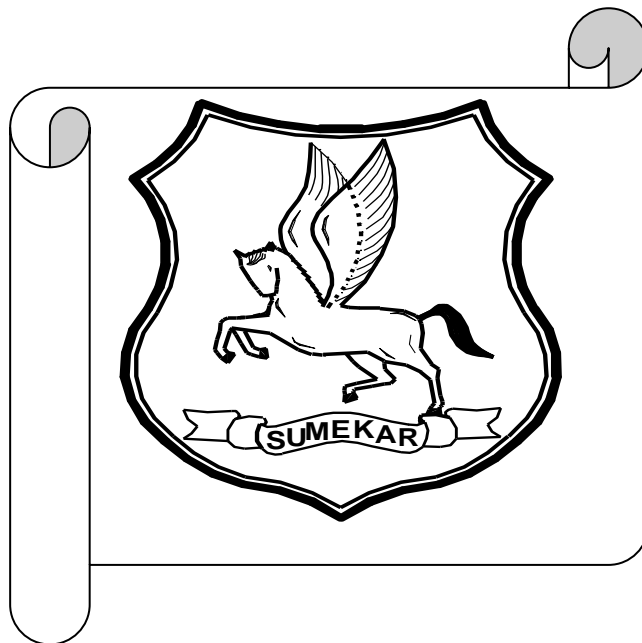


RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dokumen Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian lokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan untuk menyesuaikan pelaksanaan program/kegiatan dengan kondisi pasca pandemi saat ini yang sudah dilakukan penghapusan oleh Pemerintah, akan tetapi Renja Perubahan disusun untuk merumuskan rencana kerja oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2025 yang perlu dilakukan penyesuaian.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB. I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB. II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II 2024
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja berdasarkan urusan hingga Triwulan II Tahun 2024
 - 2.2 Faktor Pendorong Kinerja Program/Kegiatan

| | | |
|----------|-----|---|
| | 2.3 | Faktor Penghambat Kinerja Program/Kegiatan |
| | 2.4 | Tindaklanjut atas Evaluasi Program/Kegiatan |
| BAB. III | : | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH |
| | 3.1 | Kegiatan Lanjutan Tahun 2024, Pergeseran, Penghapusan, Penambahan, Pengurangan Target dan Pagu, Perubahan Lokasi dan Kelompok Sasaran |
| BAB. IV | : | PENUTUP |

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) 2025
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2025

Realisasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 dapat dilihat pada table dibawah ini :

FORMULIR E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP
PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN I 2025

| No | Sasaran | Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Lalu (2024) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|------|---|---|---|----|---|----|--|----|---------------------------------|----|---|----|---|----|--|----|--|----|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 13=9+10+11+12 | | 14=13/8x100% | | 15=7+13 | | 16=15/6x100% | | 17 |
| | | 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|----|------|----|---|--|------------|----------------|--|--|----------------|---------------|------|---------------|------|---------------|-------|-------|------|---------------|-------|------|--|
| 1 | Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 2 | 18 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor | 20 | 39.836.384.605 | | | 20 | 5.762.907.911 | 5,51 | 1.263.895.234 | 5,51 | 1.263.895.234 | 27,55 | 21,93 | 5,51 | 1.263.895.234 | 27,55 | 3,17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | 2 | 18 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | 60 Dokumen | 699.635.225 | | | 12 Dokumen | 2.468.900 | 3 | 975.300 | 3 | 975.300 | 25,00 | 39,50 | 3 | 975.300 | 5,00 | 0,14 | |
| | | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | 3 Dokumen | 1.614.300 | 1 | 499.500 | 1 | 499.500 | 33,33 | 30,94 | 1 | 499.500 | | | |
| | | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | 2 Dokumen | 476.100 | 2 | 475.800 | 2 | 475.800 | 100 | 99,94 | 2 | 475.800 | | | |
| | | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 3 Laporan | 378.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| | | 2 | 18 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | 60 Laporan | 25.383.351.983 | | | 12 Laporan | 4.826.733.413 | 3 | 1.097.203.890 | 3 | 1.097.203.890 | 25 | 22,73 | 3 | 1.097.203.890 | 5,00 | 4,32 | |
| | | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 36 Orang/bulan | 4.826.733.413 | 36 | 1.097.203.890 | 36 | 1.097.203.890 | 100 | 22,73 | 36 | 1.097.203.890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|------|----|--|--|----------|---------------|--|--|-------------|-------------|----|------------|----|------------|--------|-------|------|------------|------|------|------|---|--|--|
| | | 2 | 18 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 507 Unit | 4.246.933.841 | | | 108 Unit | 151.883.380 | 26 | 19.982.700 | 26 | 19.982.700 | 24,07 | 13,16 | 26 | 19.982.700 | 5,13 | 0,47 | | | | |
| | | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | | 6 Paket | 4.998.000 | 2 | 1.247.000 | 2 | 1.247.000 | 33,33 | 24,95 | 2 | 1.247.000 | | | | | | |
| | | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | | 6 Paket | 3.954.400 | 2 | 1.126.700 | 2 | 1.126.700 | 33,33 | 28,49 | 2 | 1.126.700 | | | | | | |
| | | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | | 7 Paket | 44.155.000 | 1 | 2.509.500 | 1 | 2.509.500 | 14,29 | 5,68 | 1 | 2.509.500 | | | | | | |
| | | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | | 2 Paket | 5.580.200 | 0 | 539.500 | 0 | 539.500 | 0,00 | 9,67 | 0 | 539.500 | | | | | | |
| | | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | | | | 1 Dokumen | 12.780.000 | 1 | 1.080.000 | 1 | 1.080.000 | 100,00 | 8,45 | 1 | 1.080.000 | | | | | | |
| | | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | | | | | 4 Dokumen | 9.996.300 | 1 | 1.241.000 | 1 | 1.241.000 | 25,00 | 12,41 | 1 | 1.241.000 | | | | | | |
| | | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | 136 Laporan | 60.542.000 | 10 | 12.239.000 | 10 | 12.239.000 | 7,35 | 20,22 | 10 | 12.239.000 | | | | | | |
| | | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | 12 Dokumen | 9.877.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 2 | 18 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan | 382 unit | 2.655.606.861 | | | 82 unit | 4.815.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|----|------|----|---|--|-----------|---------------|--|--|-----------|-------------|------|-----------|------|-----------|-------|------|--------|-----------|-------|------|--|
| 2 | Meningkatnya Iklim Investasi | 2 | 18 | 03 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase Peningkatan Jumlah Investor | 3,85 | 1.467.131.066 | | | 3,79 % | 204.427.100 | 0 | 1.070.000 | 0,00 | 1.070.000 | 0,00 | 0,52 | 0,0000 | 1.070.000 | 0,00 | 0,07 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | 2 | 18 | 03 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Media Promosi Penanaman Modal | 25 Media | 1.467.131.066 | | | 5 Media | 204.427.100 | 0 | 1.070.000 | 0 | 1.070.000 | 0 | 0,52 | 0 | 1.070.000 | 0,00 | 0,07 | |
| | | 2 | 18 | 03 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | | | | | 1 Dokumen | 204.427.100 | 0 | 1.070.000 | 0 | 1.070.000 | 0 | 0,52 | 0 | 1.070.000 | | | |
| 3 | Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat | 2 | 18 | 04 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) | 3,85 | 4.000.346.909 | | | 3,79 % | 289.264.320 | 1,27 | 2.696.000 | 1,27 | 2.696.000 | 34,60 | 0,93 | 1 | 2.696.000 | 32,99 | 0,07 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | 2 | 18 | 04 | 2.01 | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan | 37814 NIB | 4.000.346.909 | | | 6639 NIB | 289.264.320 | 0 | 2.696.000 | 0 | 2.696.000 | 0,00 | 0,93 | 0 | 2.696.000 | 0,000 | 0,07 | |

2.2. Faktor Pendorong Kinerja pada Program/Kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan anggaran rutin sesuai dengan anggaran kas
 - b. Kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah bersifat penyediaan sehingga disesuaikan dengan kebutuhan
2. Program Promosi Penanaman Modal
 - a. Pelaksanaan kegiatan sumenep investment summit (SIS) pada bulan September sesuai dengan kalender event sumenep 2025.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Tersedianya anggaran peningkatan kualitas layanan dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis risiko terintegrasi.
4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a. Penyediaan anggaran sesuai dengan anggaran kas
 - b. Perencanaan kegiatan telah disusun sesuai dengan kondisi saat ini.

2.3. Faktor Penghambat Kinerja pada Program/Kegiatan, sebagai berikut :

1. Program/Kegiatan pada DPMPTSP
 - a. Pada pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan masih belum dilaksanakan karena akan menyesuaikan dengan terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan akan banyak belanja yang akan dilakukan efisiensi anggaran tersebut sehingga akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan kinerja OPD.
 - b. Terbitnya surat edaran Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembatasan Pencairan Belanja/Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, dimana salah satu pointnya adalah pencairan belanja hanya dibatasi 5% setiap kode belanja sesuai pagu anggaran perbulan seperti yang tertuang dalam anggaran kas yang telah disusun.

2.4. Tindaklanjut atas Evaluasi Program/Kegiatan

1. Program/Kegiatan pada DPMPTSP
 - a. Melakukan pemetaan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilakukan penyesuaian terhadap efisiensi belanja sesuai dengan point-point pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025, serta mengajukan

beberapa kegiatan prioritas yang sangat menunjang terhadap kinerja OPD

- b. Menyampaikan hasil pemetaan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang telah disesuaikan dengan efisiensi anggaran atas Inpres Nomor 1 Tahun 2025 pada TAPD dan pengajuan kegiatan prioritas penunjang OPD.
- c. Menyusun rencana perubahan anggaran belanja Tahun 2025 hasil pemetaan yang telah disetujui oleh TAPD pada SIPD-RI dan kegiatan prioritas penunjang kinerja OPD.
- d. Melakukan identifikasi dan survey lokasi terhadap pelaksanaan Sumenep Investment Summit (SIS) yang akan dilaksanakan pada bulan September 2025 sebagai salah satu promosi investasi.
- e. Peningkatan digitalisasi system terintegrasi dan pengembangan website dalam rangka optimalisasi Pelayanan Publik pada MPP.
- f. Kegiatan prioritas penunjang kinerja OPD yaitu pengawasan penanaman modal pada pelaku usaha terhadap pelaporan LKPM tetap diupayakan dalam rangka mendorong realisasi investasi daerah.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH 2025

Rencana kerja dan pendanaan perubahan tahun 2025 mengalami perubahan signifikan menyesuaikan Inpres Nomor 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran APBN dan APBD akan tetapi tetap memperhatikan Program Prioritas OPD dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dengan melakukan efisiensi dan pergeseran anggaran pada beberapa sub kegiatan yang pada tahun ini diperkirakan tidak akan dilaksanakan dikarenakan tidak akan memenuhi target pada tahun ini, hal tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.1
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| | |
|---|--|
| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | REKAPITULASI RKA-PERUBAHAN BELANJA SKPD |
| Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 | |

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| Rincian Anggaran Belanja Perubahan Berdasarkan Program dan Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|--------|-----------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------|
| Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---------------------------|--|--|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------|
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 6.271.529. 317 | Rp. 4.815.01 4 | | | Rp. 6.276.344. 331 | Rp. 6.041.893. 027 | Rp. 4.995.000 | | | Rp. 6.046.888.02 7 |
| 2 | 18 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | Rp. 6.271.529. 317 | Rp. 4.815.01 4 | | | Rp. 6.276.344. 331 | Rp. 6.041.893. 027 | Rp. 4.995.000 | | | Rp. 6.046.888.02 7 |
| 2 | 18 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | Rp. 5.758.092. 897 | Rp. 4.815.01 4 | | | Rp. 5.762.907. 911 | Rp. 5.689.813. 233 | Rp. 4.995.000 | | | Rp. 5.694.808.23 3 |
| 2 | 18 | 01 | 2,01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 2.468.900 | | | | Rp. 2.468.900 | Rp. 2.468.900 | | | | Rp. 2.468.900 |
| 2 | 18 | 01 | 2,01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.614.300 | | | | Rp. 1.614.300 | Rp. 1.614.300 | | | | Rp. 1.614.300 |
| 2 | 18 | 01 | 2,01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa | | Rp. 476.100 | | | | Rp. 476.100 | Rp. 476.100 | | | | Rp. 476.100 |
| 2 | 18 | 01 | 2,01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2,01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2,01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2,01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa | | Rp. 378.500 | | | | Rp. 378.500 | Rp. 378.500 | | | | Rp. 378.500 |
| 2 | 18 | 01 | 2,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 4.826.733. 413 | | | | Rp. 4.826.733. 413 | Rp. 4.851.721. 365 | | | | Rp. 4.851.721.36 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---------------------------|--|--------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 2 | 18 | 01 | 2,02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa | Rp. 4.826.733. 413 | | | Rp. 4.826.733. 413 | Rp. 4.851.721. 365 | | | | Rp. 4.851.721.36 5 |
| 2 | 18 | 01 | 2,02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2,05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2,05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | Rp. 151.883.38 0 | | | Rp. 151.883.38 0 | Rp. 110.818.9 00 | | | | Rp. 110.818.900 |
| 2 | 18 | 01 | 2,06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa | Rp. 4.998.000 | | | Rp. 4.998.000 | Rp. 4.998.000 | | | | Rp. 4.998.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2,06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa | Rp. 3.954.400 | | | Rp. 3.954.400 | Rp. 3.954.400 | | | | Rp. 3.954.400 |
| 2 | 18 | 01 | 2,06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2,06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa | Rp. 44.155.000 | | | Rp. 44.155.000 | Rp. 14.155.00 0 | | | | Rp. 14.155.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2,06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa | Rp. 5.580.200 | | | Rp. 5.580.200 | Rp. 5.580.200 | | | | Rp. 5.580.200 |
| 2 | 18 | 01 | 2,06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa | Rp. 12.780.000 | | | Rp. 12.780.000 | Rp. 12.780.00 0 | | | | Rp. 12.780.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2,06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Sumenep, Kota Sumenep, | Rp. 9.996.300 | | | Rp. 9.996.300 | Rp. 9.996.300 | | | | Rp. 9.996.300 |

Tabel 3.2
USULAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2025

| NO. | LATAR BELAKANG USULAN | SUB KEGIATAN | URAIAN USULAN (BELANJA) | KONDISI BELANJA S.D MENDAHULUI | | USULAN PERUBAHAN BELANJA (penambahan/pengurangan) | | REALISASI BELANJA | KETERANGAN |
|-----|---|--|---|--------------------------------|---------|---|----------|-------------------|--|
| | | | | (Rp). | OUTPUT | (Rp). | OUTPUT | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | |
| | | <i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | | | | | |
| 1 | Rencana pelaksanaan relokasi MPP pada Tahun 2025 ke ex. Gedung DPRD | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 7 paket | Rp 322.304.000 | 10 paket | | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Dekorasi Outlet Layanan MPP) | Rp - | - | Rp 260.000.000 | 26 paket | Rp - | Partisi Outlet Layanan pada MPP |
| | | | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Peresmian MPP di ex. Gedung DPRD) | Rp - | - | Rp 60.000.000 | 2 keg | Rp - | Pelaksanaan Peresmian MPP di ex. Gedung DPRD |
| | | | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Biaya angkut Barang MPP) | Rp - | - | Rp 2.304.000 | 1 unit | Rp - | Mobilisasi Peralatan MPP dan Kantor DPMPTSP |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|--|
| | | <i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | | | | Rp. 524.980.288 | 357616 kwh | | |
| | | | Belanja Jasa Tagihan Listrik, ex. Gedung DPRD | Rp. 200.945.712 | 136884 kwh | Rp. 524.980.288 | 357616 kwh | Rp. 45.805.715 | Penyediaan Jasa Tagihan Listrik pada ex. Gedung DPRD |
| | | <i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan aktifitas mobil operasional dan layanan publik kurang optimal dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan penertiban pelaku usaha | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 5 unit | Rp 51.919.920 | 5 unit | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Peremajaan Mobil Operasional) | Rp 10.080.000 | 1 unit | Rp 22.320.000 | 3 unit | Rp - | Peremajaan Mobil Operasional |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Peremajaan Mobil Layanan) | Rp 4.000.080 | 1 unit | Rp 29.599.920 | 1 unit | Rp - | Peremajaan Mobil Layanan |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|-----------------------|--------------------------|---|--|
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | | | |
| | | <i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah</i> | | | | | | | |
| 3 | Pelaksanaan Promosi Investasi Tingkat Provinsi yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan jumlah investor di Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rp. 70.000.000 | 1 Kegiatan | | |
| | | | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Pameran investasi dalam rangka pelaksanaan promosi investasi) | - | | Rp. 70.000.000 | 1 Kegiatan | - | Pameran Promosi Investasi Tingkat Provinsi |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | |
| | | <i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | | | | |
| 3 | Pada Tahun 2025 tidak terdapat Fasilitas Anggaran DAK Non Fisik Urusan Penanaman Modal dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal serta sesuai dengan Petunjuk Yth. Bapak Bupati Sumenep | Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal | | | - | Rp 96.062.000 | 15 Kegiatan Usaha | | Perintah Yth. Bapak Bupati Sumenep pada Rapat Koordinasi Tanggal 18 Maret 2025 (karena pada tahun 2025 tidak terdapat anggaran pengawasan dan pengendalian penanaman modal) |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|----|---|---|-----------------------|--------------|----|---|
| | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp | - | - | Rp 2.979.000 | 1 paket | Rp | - |
| | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp | - | - | Rp 5.956.000 | 2 paket | Rp | - |
| | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp | - | - | Rp 6.160.000 | 200 m2 | Rp | - |
| | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp | - | - | Rp 3.547.000 | 2 paket | Rp | - |
| | | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Rp | - | - | Rp 9.000.000 | 2 paket | Rp | - |
| | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp | - | - | Rp 28.300.000 | 78 org/kali | Rp | - |
| | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp | - | - | Rp 40.120.000 | 172 org/kali | | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | Rp 995.266.208 | | | |

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Perubahan SKPD menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable development). RENJA Perubahan SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep pada Tahun 2025, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyesuaikan situasi dan kondisi terkini saat ini. RENJA Perubahan juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berjalan, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. RENJA Perubahan sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Sumenep Tahun 2025. Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.
2. Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dengan menyesuaikan Inpres Nomor 01 Tahun 2025.

3. Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Perubahan.
4. Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masing-masing SKPD.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD Perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.

Sumenep, Juni 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP



Dr. R. ABD. RAHMAN RIYADI, SE., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001